

Judul : Bayar uang kuliah, pemerintah diminta libarkan himbara
Tanggal : Kamis, 11 Juli 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Bayar Uang Kuliah Pemerintah Diminta Libatkan Himbara

WAKIL Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf meminta Pemerintah melibatkan Bank Himbara jika ingin menerapkan sistem pembayaran seperti *student loan* untuk membantu mahasiswa bayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Karena dia menentang negara berbisnis dengan mahasiswa.

Dede yakin, Pemerintah punya opsi membantu orang tua atau siswa bisa menyelesaikan UKT. Bisa melalui *endowment fund*, dana abadi, atau bekerja sama dengan bank-negara.

"Yang penting, jangan swasta yang mengelola pinjaman-pinjaman mahasiswa ataupun orang tua. Karena negara tidak boleh berbisnis dengan siswa," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X dengan jajaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi di Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Politisi Partai Demokrat itu meminta Pemerintah lebih peduli dengan pemasalahan pendidikan terutama terkait pembayaran UKT ini. Pemerintah diminta tidak melakukan bisnis terkait persoalan pendidikan.

Karena kalau negara berbisnis atau diizinkan orang berbisnis di dalam kampus, lanjutnya, segala sesuatu akan masuk di sara. Negara harus mengambil alih melalui bank Himbara atau melalui konsorsium bank-bank negara.

"Silakan formatnya apa, mau

formatnya *student loan*, mau formatnya cicilan dengan tenor sampai 20 tahun misalnya. Yang paling penting sesuai Undang-Undang Sisdiknas tidak boleh ada bunganya," tegasnya.

Dia lalu menyoroti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang setiap tahun mengalami permasalahan. Tujuh tahun PPDB, formatnya masih sama.

"Harusnya ada perubahan yang mendasar. Saya tawarkan tiga opsi, tiga opsi ini mudah-mudahan bisa dilihat nanti di dalam pemerintahan berikutnya," ujarnya.

Opsi pertama, membangun sekolah baru. Opsi ini tentu akan memakan anggaran tapi bisa memanfaatkan Transfer Keuangan Daerah (TKD).

"Apabila disisipkan saja mungkin Rp 50 triliun tiap tahun, maka dalam 10 tahun itu (Pembangunan sekolah baru) akan

selesai. Jadi untuk membangun sekolah-sekolah baru, itu opsi pertama. Tentu membutuhkan waktu, membutuhkan aset dan sebagainya," tuturnya.

Kedua, pemberdayaan sekolah swasta dalam proses PPDB, sehingga *output* lulusan sekolah dapat tertampung semua ke sekolah jenjang berikutnya.

"Intinya, *output* SD semua tertampung di SMP, *output* SMP semua tertampung di SMA. Mau itu sekolah negeri, mau itu sekolah swasta. Namun, butuh dukungan swasta," ucapnya. ■ KAL